

## **SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM TANTANGAN**

Anita Lie

### **Abstract**

*Two items appear at the horizon when looking at the highly productive population of this country: hope and challenge. On the one hand, a high percentage of young people inspires hope of productivity, creativity and innovation. On the other hand, we see the challenges of reducing unemployment and developing the quality of our human resource. Fulfilling the need for quality basic education and health services of the people is required to be able to face this challenge. There are three basic problems with respect to systems and policies of national education in Indonesia: (1) there is a tug-of-war between centralization and decentralization as regards systems and policies; (2) there is a need to provide quality education to everyone and for everyone; and (3) Clarity of goals : for whom is this education? And on whose side is national education on? Any choice of national policy for the educational system must orient educational practice at the national level while at the same time appreciating the value of local wisdom and taking into consideration the variety of backgrounds that the people may have.*

*There needs to be good will among public education policy makers at the national and regional levels to the point of even inviting representatives from teachers at the local level to participate in the making of the curriculum, asking them to be involved in the management of the educational process, soliciting their help in the implementation of the plan at all levels, asking them to assist in the periodical assessments and following them up on it. These teachers should, in fact, be and actually are at the frontline of the effort to provide a national policy for the system of education and should be actively involved in its implementation. Any educational system should aim at the eradication of poverty from society and, at the same time, out of justice, to provide education to everyone and for everyone. These principles really need to be followed considering the variety of the situations of people who are living in Indonesia.*

### **Key Words**

*National Education. Education system. Practice of education. Teacher. Student. Young people. Productive age. Curriculum. Standard. Policy.*

### **Abstrak**

Jumlah penduduk usia produktif memunculkan dua sisi penilaian: harapan dan tantangan. Harapannya adalah tumbuhnya generasi yang sehat dan produktif, kreatif dan inovatif. Tantangannya adalah kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang memadai dan tingkat kualitas sumber daya manusia yang rendah. Layanan pendidikan dasar (dan kesehatan) mesti menjawab tantangan dan memenuhi

kebutuhan tersebut. Ada tiga persoalan dasar dalam sistem dan kerangka kebijakan pendidikan di Indonesia: 1) Sentralisasi-Desentralisasi dalam dunia pendidikan nasional. 2) Komitmen Pendidikan yang Bermutu untuk Semua. 3) Kejelasan Sasaran: untuk siapakah pendidikan itu dan ke manakah kebijakan pendidikan nasional berpihak. Kebijakan penetapan standar kurikulum berskala nasional dibutuhkan sebagai orientasi dan arahan ideal bagi praksis pendidikan lokal (di daerah-daerah), tetapi prinsip keberagaman dan kearifan lokal yang terkandung dalam praksis pendidikan di tingkat lokal tetap harus dihargai.

Itikad baik untuk menjalin kerja sama antara para pemangku kebijakan pendidikan nasional dan para guru di daerah-daerah, mulai dari persiapan penyusunan suatu kurikulum, proses penyusunannya, pelaksanaannya, dan evaluasinya, serta tindak lanjutnya. Para guru sebagai pihak penentu apakah kurikulum dalam suatu sistem pendidikan nasional dapat digunakan dengan efektif atau tidak. Suatu sistem dan praksis pendidikan nasional mesti memiliki visi dan keberpihakan terhadap pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Prinsip keadilan menjembatani kesenjangan sosial dan pendidikan bagi masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

### **Kata-kata Kunci**

Pendidikan Nasional. Praksis Pendidikan. Guru. Peserta didik. Usia Produktif. Kurikulum. Standar. Kebijakan.

## **1. Pendahuluan**

Tiga dekade mendatang ini merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk menikmati dan memanfaatkan Bonus Demografi (*The World Bank*, 2010). Ketika banyak negara mapan sedang menderita sindrom *The Graying of the Society* dan menanggung beban membesarnya kelompok masyarakat lanjut usia yang harus ditopang oleh kelompok masyarakat usia produktif yang semakin menciut, Indonesia justru mempunyai potensi sangat besar untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan situasi demografi yang sangat menguntungkan. Dalam dekade 2010 sampai dengan 2030, Indonesia akan mempunyai penduduk usia produktif (15 s/d 64 tahun) sebesar 70% sementara anak-anak berusia 0-14 tahun berkisar di bawah 30% dan penduduk usia lanjut tidak lebih besar dari 10%. Grafik di bawah ini menunjukkan momentum Bonus Demografi tersebut:

Potensi pertumbuhan ini akan menjadi kenyataan jika prakondisi

bisa dipenuhi, yakni persiapan penduduk usia produktif yang terdidik dan sehat. Orang-orang muda usia produktif yang sehat, trampil, dan kompeten akan memberikan kontribusi sangat signifikan bagi pertumbuhan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Sementara itu pemerhati yang skeptis terhadap situasi bonus demografi ini justru mencemaskan ancaman bom demografis jika pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan perhatian kepada orang muda dan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi mereka (Hardjono, 2012). Kecemasan ini mengacu pada tesis Gunmar Heinsohn, profesor ilmu sosial di Universitas Bremen, direktur Raphael-Lemkin Institute for Comparative Genocide Research, yang menemukan dalam penelitiannya keterkaitan antara jumlah penduduk usia muda dengan kekacauan dan kekerasan sosial. Melalui studi sejarah, Heinsohn menunjukkan bahwa jumlah orang muda yang tidak bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dan penghasilan yang memuaskan akan berubah menjadi bom demografis karena jumlah besar energi muda yang tidak puas memuat resiko tinggi untuk menjadi sumber ketidak-stabilan sosial dan politis. Secara spesifik, Heinsohn menulis, “when 30 % or more of a nation’s male inhabitants are in the 15-29 age bracket and there is no sufficient employment, the result is chaos, violence and upheaval.”

Dalam kerangka Hausmann, Rodric, dan Velasco (2005), pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat akan mengalami beberapa hambatan potensial, di antaranya rendahnya mutu sumber daya manusia. Pohon diagnostik dalam kerangka HRV mengeksplorasi kelayakan dipekerjakan (*employability*). Pendekatan kelayakan pekerja melihat masalah dari sudut pandang pendidikan individu dan kondisi kesehatan yang mereka bawa ke pekerjaan.

Dalam konteks ini, peningkatan layanan dasar pendidikan (dan kesehatan) merupakan prasyarat mutlak bagi segala upaya pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan masyarakat di Indonesia. Kegagalan dalam bidang pendidikan dituding sebagai penghambat kemajuan perekonomian. Analisis kelayakan kerja (*employability*) di Jawa Timur, misalnya, menunjukkan beberapa temuan yang memprihatinkan (*The*

*World Bank*, 2011). Rendahnya kualitas sumber daya manusia dikuatirkan akan menjadi kendala bagi produktivitas tenaga kerja di Jawa Timur. Mayoritas angkatan kerja di Jawa Timur berkecakupan rendah. Pada tahun 2009, 55% angkatan kerja di Jawa Timur adalah lulusan SD atau lebih rendah termasuk 21% dari total angkatan kerja yang belum pernah mengenyam pendidikan formal atau tidak menyelesaikan sekolah dasar. Hanya 6% dari angkatan kerja di Jawa Timur yang pernah mendapatkan pendidikan pasca SMA/SMK. Kawasan perkotaan mempunyai angkatan kerja yang lebih terdidik dibandingkan kawasan pedesaan. 44% angkatan kerja di perkotaan lulusan SLTA dibandingkan hanya 15% di pedesaan. Selain itu, indikator pencapaian pendidikan di Jawa Timur seperti angka melek huruf dan lama tahun bersekolah lebih rendah dibandingkan di provinsi lain di Jawa dan angka rata-rata nasional. Pada tahun 2008, angka melek huruf pria dan perempuan di Jawa Timur adalah 92% dan 83%, lebih rendah dibandingkan angka nasional, yaitu 95% dan 89% serta pencapaian di DKI, yaitu 99,6% dan 97,9%. Demikian pula, rata-rata tahun bersekolah di Jawa Timur lebih rendah secara signifikan, yaitu 7,5 tahun untuk laki-laki dan 6,4 tahun untuk perempuan, dibandingkan dengan DKI Jakarta (10,7 tahun untuk laki-laki dan 9,7 tahun untuk perempuan) dan tingkat nasional (8,0 tahun untuk laki-laki dan 7,1 tahun untuk perempuan). Meskipun akses terhadap pendidikan dasar sudah cukup besar di Jawa Timur, akses terhadap pendidikan menengah masih rendah dan menjadi persoalan di banyak kabupaten. Pada tahun 2009, angka partisipasi murni di Jawa Timur adalah 95% untuk SD, 70% untuk SMP, dan 48% untuk SLTA. Program wajib belajar 9 tahun yang sudah dicanangkan pemerintah masih belum berhasil. Situasi pendidikan di luar Jawa, terutama di daerah tertinggal, bahkan makin menyedihkan. Di atas kertas, berbagai survey (misalnya angka melek huruf dan angka partisipasi murni) menunjukkan disparitas yang sangat memprihatinkan antar provinsi dan daerah.

Visi pembangunan dan kemajuan bangsa melalui pendidikan perlu didukung dengan koherensi sistem dan kebijakan pendidikan. Saat ini ada tiga permasalahan mendasar dalam sistem dan kerangka kebijakan

pendidikan di Indonesia: sentralisasi-desentralisasi, komitmen pendidikan bermutu untuk semua, dan kejelasan sasaran.

## **2. Sentralisasi - Desentralisasi**

Banyak negara--maju maupun berkembang, masih terus berproses dan ber-eksperimen dalam tarik-ukur sentralisasi dan desentralisasi. Ketika dinamika institusi-institusi politik dan ekonomi sedang berlangsung dalam tarik ulur ini (di antaranya, polemik pembahasan RUU pengganti UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah), sistem pendidikan di Indonesia juga terus ber-eksperimen dalam kebijakan pusat-daerah. Ada banyak kajian tentang kemajuan pembangunan pendidikan negara-negara maju dan kaitannya dengan pembagian wewenang pusat-daerah. Setiap negara mempunyai sistem pendidikan yang unik dan tidak bisa dibandingkan secara langsung. Namun ada pelajaran berharga yang bisa diambil untuk pembangunan pendidikan di Indonesia. Dalam tarik ulur pusat-daerah, tiga area kebijakan pendidikan perlu diperjelas, yakni kebijakan kurikulum dan ujian nasional, pembiayaan, serta pendidik dan tenaga kependidikan. PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan memuat delapan standar. Empat di antaranya--standar isi dan standar kompetensi (menyangkut kurikulum), standar pembiayaan, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan mengandung nilai strategis dalam pencapaian visi pembangunan pendidikan sementara empat lainnya terlalu instrumental dan teknis (misalnya, standar sarana dan prasarana mengatur jumlah minimal ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, dsb).

### **2.1. Kurikulum dan Ujian Nasional**

Kebijakan kurikulum termasuk substantif karena memuat apa yang penting dan harus diajarkan. Polemik standar kurikulum terus terjadi di kalangan pakar pendidikan. Perbandingan antar negara menjadi materi argumen oleh kedua belah pihak pengusung maupun penentang standar kurikulum. Pakar pendukung kebijakan standar kurikulum berpendapat standar nasional dibutuhkan sebagai acuan untuk memperbaiki mutu

pendidikan sementara para penentang mengkhawatirkan standar nasional akan mengarah pada reduksi esensi pendidikan dan minimalisasi pencapaian. Tidak ada bukti cukup kuat yang mendukung korelasi standar nasional dengan kemajuan pendidikan di negara-negara lain. Bahkan, sentralisasi standar nasional kurikulum di China tidak mengurangi kesenjangan capaian akademik di antara siswa dari berbagai daerah (Yong Zhao, 2010). Finlandia sering menjadi acuan sebagai negara maju dengan mutu dan capaian pendidikan yang cemerlang. Negara ini mempunyai sistem standar nasional namun menyerahkan implementasi dan penilaian pada komunitas lokal. Bangsa Indonesia membutuhkan kesatuan visi tentang tujuan pendidikan dan *the Indonesian Dream* secara nasional dengan eksekusi yang menghargai keberagaman di tingkat lokal. Standar seharusnya menjadi arahan dan ideal, bukan hasil yang harus dicapai. Keunggulan membutuhkan perjuangan menuju yang ideal bukan kepatuhan terhadap ekspektasi minimal.

Beberapa bulan ini pemangku kepentingan Sistem Pendidikan Nasional mengalami kegaduhan seputar pemberlakuan Kurikulum 2013. Tulisan Wakil Presiden Boediono (*Kompas*, 27 Agustus 2012) berjudul "Pendidikan Kunci Pembangunan" tampaknya memacu segera diadakan pergantian kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah terus-menerus memantau kurikulum. Namun pernyataan publik dari Wakil Presiden melalui artikel media massa ini langsung disusul dengan keterangan pers Mendikbud Mohammad Nuh tentang rencana pemerintah mengganti Kurikulum 2006. Dibentuklah tim yang terdiri dari aparat Kemendikbud dan sejumlah tokoh yang terbagi dalam tim narasumber, tim inti, dan tim teknis untuk menggodok Kurikulum 2013.

Wacana yang berkembang di masyarakat terkait dengan Kurikulum 2013 sudah sangat marak. Ada berbagai persepsi dan kritik yang sudah berkembang dan perlu dihargai sebagai bagian dari proses pematangan kurikulum yang sedang disusun. Terlepas dari cemooh "ganti menteri, ganti kurikulum" dari kalangan masyarakat, kurikulum memang harus

senantiasa berubah seiring dengan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Kritik dari kalangan industri justru diarahkan pada keengganan dunia pendidikan untuk merespon perubahan dalam masyarakat dan metransformasi diri.

Dalam teori kurikulum, keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang mulai dari kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, persiapan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum--termasuk pembelajaran--dan penilaian pembelajaran dan kurikulum. Dalam konteks ini, setiap kurikulum mempunyai potensi keberhasilan dan faktor penghambat. Termasuk dalam faktor penentu keberhasilan adalah komitmen pemegang otoritas pendidikan di tingkat daerah, pengembangan kapasitas guru, dan desain penilaian belajar siswa. Apakah Kurikulum 2013 ini akan memenuhi harapan masyarakat dan berperan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tentunya masih memerlukan komitmen, perjuangan, dan kerja keras para pembuat kebijakan dan pemegang otoritas pendidikan di tingkat nasional dan daerah, kepercayaan dan dukungan para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kesiapan para pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pelaksana pada tingkat tata kelola pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran.

Terkait erat dengan kurikulum adalah penilaian hasil belajar atau dikenal oleh publik sebagai ujian. Dalam permasalahan sentralisasi-desentralisasi, ujian nasional mendapat sorotan secara terus menerus sampai pada titik kulminasi April 2013 ketika administrasi ujian nasional terhambat oleh keterlambatan pencetakan dan distribusi soal yang menyebabkan penundaan ujian nasional SMA di 11 provinsi. Walaupun kritikan terhadap ujian nasional terus dilayangkan dan Mahkamah Agung telah memenangkan gugatan masyarakat lewat *citizen law suit* soal penyelenggaraan ujian nasional pada 2009, pemerintah tetap melaksanakan ujian nasional dengan alasan kebutuhan standarisasi.

Perbaiki sistem penilaian pendidikan mencakup tiga isu sentra: prinsip penilaian belajar, kredibilitas penyelenggaraan, dan perbaikan

administrasi. Pertama, prinsip penilaian belajar. Ada berbagai macam tujuan, bentuk, dan format penilaian belajar. Salah satu pepatah yang juga berlaku dalam penilaian belajar--*Not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts* (tidak semua yang bermakna bisa dihitung dan tidak semua yang bisa dihitung bermakna) mensyaratkan adanya penilaian alternatif dan otentik dalam PBM. Ujian berbentuk pilihan ganda seperti ujian nasional tentu saja tidak memadai untuk menilai prestasi, kemajuan, maupun kekurangan peserta didik. Kedua, pelanggaran dalam penyelenggaraan tidak semestinya ditolerir dengan label *ekses* dan *oknum*. Ini bukan persoalan persentase dalam statistik. Dalam pendidikan, rasio pelanggaran (yang dianggap) sangat kecil sudah menjadi persoalan sangat serius karena memberikan dampak modeling negatif yang akan sangat merusak proses pendidikan karakter anak dan bangsa. Pemberitaan mengenai bocornya soal-soal ujian nasional dan beredarnya kunci jawaban sudah menurunkan kredibilitas ujian itu sendiri. Ketiga, perbaikan sistem membutuhkan evaluasi secara terus menerus. Soal-soal maupun sistem administrasi tes seperti TOEFL dan yang semacamnya sering menjadi bahan kajian terbuka dalam forum-forum para pakar dan peneliti. Bahkan, soal-soal dalam tes terdahulu bisa diakses publik secara terbuka. Selama beberapa dekade pelaksanaannya, ada banyak sekali perubahan dan kemajuan mendasar. Mekanisme evaluasi internal maupun hasil kajian publik telah memungkinkan tes-tes tersebut meningkatkan kesahihan dan keterandalannya secara berkelanjutan.

## 2.2. Pembiayaan

Standar pembiayaan sertastandar pendidik dan tenaga kependidikan juga memegang peran strategis dalam pembangunan pendidikan secara nasional. Belajar dari negara-negara dengan sistem pendidikan yang berhasil (Kanada, Finlandia, Jepang, Korea, dan Singapura), dibutuhkan komitmen serius terhadap kebijakan pembiayaan dan rekrutmen/pengembangan pendidik. Dalam konteks Indonesia saat ini, belum saatnya menyerahkan kedua hal ini sepenuhnya pada komitmen dan kejujuran pemerintah daerah. Ada variasi komitmen dan kompetensi kepala



daerah yang masih terlalu besar. Secara nasional, alokasi minimum 20% dari APBN (sekitar Rp. 200 triliun pada 2010) untuk pendidikan sudah menghasilkan peningkatan akses terhadap pendidikan (APK dan APM) namun kualitas masih menjadi masalah besar. Bank Dunia mencatat permasalahan ketidak-efisienan dalam pengeluaran pendidikan

### **2.3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Faktor lain yang terkait dengan kegagalan kurikulum adalah lepasnya peran guru dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kurikulum. Agar kurikulum beroperasi dengan efektif, tidak cukup hanya menyusun suatu dokumen dengan kata-kata bagus dan jargon menarik. Sebagai satu bagian sentral dari kurikulum (dalam arti yang luas, baca Glatthorn, 2006), guru sangat menentukan apakah kurikulum yang digunakan akan efektif atau tidak. Dalam konteks ideal, guru terlibat mulai dari tahap persiapan penyusunan kurikulum, proses pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam konteks ini, dibutuhkan guru yang profesional, kompeten, berdedikasi, kreatif, dan inovatif. Dalam konteks persekolahan di Indonesia yang sesungguhnya, guru diposisikan sebagai operator untuk menyampaikan kurikulum yang *teacher-proof*. Posisi guru sebagai operator ini tampak nyata di banyak ruang kelas baik dalam kurikulum yang diakui atau ditengarai sebagai *teacher-proof* seperti PPSP misalnya ataupun dalam kurikulum yang seharusnya guru berperan sebagai fasilitator proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan kompeten seperti dalam Kurikulum CBSA, KBK, KTSP, dan yang akan datang Kurikulum 2013.

Kemerosotan mutu pendidikan nasional di Indonesia seperti ditunjukkan dalam berbagai data survei tingkat internasional seperti TIMSS dan Indeks Pembangunan Manusia tidak bisa dilepaskan dari rendahnya mutu guru karena guru mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Sudah cukup banyak artikel ditulis mengenai rendahnya mutu guru (misalnya Suparno, 2004). Ditengarai kekurangan minat di antara orang muda berkualitas untuk menjadi guru disebabkan salah satunya oleh minimnya jaminan kesejahteraan guru seiring dengan revolusi material dalam era globalisasi (Priyono, 2004).

Satu permasalahan fundamental dalam sistem pendidikan nasional adalah dehumanisasi pendidikan. Seharusnya, pendidikan menghormati dan menghargai martabat manusia beserta dengan segala hak asasinya. Peserta didik seharusnya tumbuh dalam kemanusiaannya sebagai subyek melalui proses pendidikan. Tapi yang sedang terjadi justru sebaliknya. Ada terlalu banyak contoh dalam praktek-praktek di sekolah yang menunjukkan betapa peserta didik sudah diperlakukan sebagai obyek demi kepentingan ideologi, politik, industri, dan bisnis. Guru sebagai pendidik tidak mampu mengembangkan kesadaran untuk menghentikan gejala dehumanisasi ini karena para guru sendiri merasa terjebak sebagai obyek dalam sistem pendidikan nasional. Berbagai persoalan di bawah ini hanya sebagian kecil dari realita dehumanisasi yang dihadapi guru dan sudah sangat lama disorot masyarakat:

1. Dengan gaji dan tunjangan yang sangat tidak memadai, guru menjadi terlalu sibuk dengan upaya mencari penghasilan tambahan sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik diabaikan atau tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Sementara itu, di berbagai daerah terpencil dengan kondisi infrastruktur dan transportasi yang masih jauh di bawah standar, peserta didik seringkali menjadi terlantar karena para guru lebih suka berlama-lama tinggal di kota berminggu-minggu setelah mengambil gaji atau liburan sekolah.
2. Terseret dalam upaya mencari penghasilan tambahan, sebagian guru di kota malah melakukan pelanggaran etika sebagai pendidik dengan memberikan les privat bagi peserta didik dan bahkan membocorkan soal-soal ulangannya sendiri, ikut menjualkan buku-buku ajar dari penerbit yang memberikan komisi paling memuaskan, atau ikut terlibat sebagai saksi yang menutup mulut atas beberapa tindakan manipulasi dan korupsi oleh birokrasi pendidikan atau pengelola sekolah. Kasus terakhir yang merebak adalah manipulasi yang dilakukan oleh beberapa guru untuk mendapatkan sertifikasi.
3. Dengan jam mengajar yang panjang dan tugas administratif yang

membebani, guru sudah tidak punya waktu untuk membaca dan mengembangkan diri. Pengetahuan, wawasan dan kreativitas guru sulit berkembang. Akibatnya, peserta didik mau bertahan duduk di hadapan guru di dalam kelas hanya karena mereka harus bertahan sebelum bel berbunyi dan menyelesaikan satu jenjang untuk mendapatkan ijazah.

4. Tambahan penghasilan dari program sertifikasi guru rupanya belum menggerakkan sebagian besar guru untuk menggunakan dana ini sebagai alat untuk pengembangan diri dan profesional, misalnya untuk studi lanjut atau partisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan. Bahkan, yang lebih parah adalah demi mendapatkan tunjangan sertifikasi, sebagian guru berani memalsukan bukti-bukti kualifikasi mereka.
5. Dengan berbagai kepahitan dan kegetiran hidup sebagai obyek dalam sistem pendidikan nasional, sebagian guru belum mampu mengembangkan mekanisme untuk mengelola emosi negatif mereka sehingga harus mengumpat di kelas, mengasihani diri sendiri atau memperlakukan peserta didik dengan penuh kemarahan.

Tentu saja di berbagai tempat masih ada banyak guru yang cerdas, cemerlang dan berhati nurani. Guru-guru ini senantiasa bersinar di tengah-tengah gambaran suram para guru seperti di atas.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru berupa program sertifikasi guru dan pemberian tunjangan profesi ternyata belum cukup berhasil meningkatkan mutu guru dan prestasi siswa. Penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kompetensi antara guru yang sudah bersertifikasi dan yang belum serta tidak ada dampak positif dari sertifikasi guru pada prestasi siswa (2012).

Program sertifikasi guru perlu diintegrasikan dengan program peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan mulai dari masa pra-jabatan sampai dengan pelatihan dalam masa jabatan.

### 3. Pendidikan Bermutu Untuk Semua

Ketika beberapa negara maju sudah beranjak dari kebijakan “pendidikan dasar untuk semua” menuju pengembangan *knowledge workers*, Indonesia masih tetap harus konsisten terhadap komitmen “pendidikan dasar untuk semua” sambil melakukan lompatan strategis agar semua anak Indonesia bisa mendapatkan kesempatan menikmati pendidikan **bermutu**.

Sayangnya, masih ada kesenjangan antara deklarasi komitmen dengan praktik. Di daerah-daerah terpencil, masih banyak anak “lulusan” Sekolah Dasar yang belum kompeten baca-tulis-hitung. Sementara itu, keluarga kelas menengah dan atas berlomba-lomba memasukkan anak mereka ke dalam sekolah-sekolah berstandar internasional, baik dalam struktur pemerintah seperti SBI dan RSBI maupun sekolah-sekolah negeri dan swasta yang telah membeli kurikulum asing.

Sudah saatnya, pemerintah pusat maupun daerah menggunakan indikator lebih dari sekedar APK dan APM untuk menilai keberhasilan pembangunan pendidikan. Pengabaian terhadap anak-anak miskin dalam sistem pendidikan nasional kelak akan berakibat pada ketimpangan dan gejolak sosial yang terlalu mahal.

### 4. Kejelasan Sasaran: Apa Yang Mau Dicapai?

Setelah pendidikan dasar dan menengah, kita perlu menjabarkan impian kita terhadap anak-anak muda Indonesia. Apakah kita mengejar sebagian negara maju dengan mendorong sebanyak-banyaknya anak muda untuk menjadi sarjana dan *knowledge workers*? Atau kita cukup realistis dengan situasi bahwa sebagian anak muda kita akan menjadi pemimpin yang terdidik sementara sebagian lainnya cukup menjadi terlatih dan trampil? Jawaban YA pada pertanyaan pertama terkesan humanis dan demokratis namun sangat tidak realistis untuk saat ini. Sebaliknya, kita mungkin tidak suka menjawab pertanyaan kedua karena mengingatkan pada rekayasa manusia ke dalam lima kasta: Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan Epsilon dalam novel *Brave New World* karya Aldous Huxley walaupun sesungguhnya kecemasan terhadap fenomena kastanisasi

(Darmaningtyas) muncul dari pengelompokan anak berdasarkan kelas sosial di sekolah-sekolah dengan berbagai tingkatan standar. Keberadaan SMA dan SMK (dipelesetkan menjadi Sekolah Menengah Anak dan Sekolah Menengah Keponakan) secara defacto sudah menunjukkan pengelompokan berdasarkan strata sosial.

Dalam catatan Bank Dunia, hanya 4% anak berusia 18-20 tahun dari kuintil pendapatan paling rendah yang bisa menikmati pendidikan tinggi. Penyelesaian terhadap permasalahan kesenjangan ini perlu dimulai dari pengakuan terhadap realita kemiskinan yang sedang kita hadapi dan pemahaman mengenai sumberdaya yang kita punyai. Strategi penyelesaian masalah perlu dibuat secara bertahap dengan kejelasan sasaran di atas prinsip keadilan bagi semua anak. Pembangunan universitas, politeknik dan akademi komunitas perlu memerhatikan tahapan dan kejelasan sasaran dalam strategi penyelesaian masalah secara jangka panjang.

**Prof. Anita Lie, Ed.D.**

Guru Besar dan Direktur Program Pascasarjana Unika Widya Mandala Surabaya.

**Daftar Rujukan**

Boediono. "Pendidikan Kunci Pembangunan." *Kompas*, 27 Agustus 2012

Dhakidae, Daniel. 2002. *Cendekiawan dan Kekuasaan. (Intellectuals and Power)*. Jakarta: Gramedia.

Glatthorn, Alan. 2006. *Curriculum Leadership: Development and Implementation*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Gruenwald, Oskar. 2011. "The University as Quest for Truth." *Journal of Interdisciplinary Studies*, XXIII, 1-18.

Hardjono, Ratih. "A demographic bonus or time-bomb?" *The Jakarta Post*, December 5, 2012.

Hausmann, Ricardo, Dani Rodric, dan Andre Velasco. 2005. "Growth Diagnostics.". Mimeo, Inter-American Development Bank.

Heinsohn, Gunnar. Islamism and War: the demographics of rage. *Open Democracy: Free Thinking for the World*

[http://www.opendemocracy.net/conflicts/democracy\\_terror/islamism\\_war\\_demographics\\_rage](http://www.opendemocracy.net/conflicts/democracy_terror/islamism_war_demographics_rage)

Heinsohn, Gunnar. 2008. *Sohne und Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall der Nationen. (Sons and World Powers: Terror in the Rise and Fall of Nations)*. Munich: Piper.

World Bank. 2011. *Diagnosa Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur: Mengidentifikasi Hambatan-Hambatan Utama Pertumbuhan yang Inklusif di Provinsi Terbesar Kedua di Indonesia*. Jakarta: World Bank.

Zhao, Yong. 2010. *Catching Up or Leading the Way*. Alexandria, VA: ASCD.